

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Menurut data BPS Februari 2008, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 9,42 juta orang (8,48%) dari total angkatan kerja sekitar 111,4 juta orang. Dari jumlah 9,42 juta orang penganggur tersebut, terdiri dari 7,4 juta orang (78,38%) adalah pemuda usia produktif (BPS, 2011).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia, diantaranya: Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara *supply* and *demand*). Kedua, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (*mis-match*). Ketiga, masih adanya anak putus sekolah maupun lulusan yang tidak melanjutkan namun tidak terserap dunia kerja/ berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai (*unskill labour*). Keempat, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global, dan Kelima, melimpahnya sumber daya alam di pedesaan, tetapi tidak di manfaatkan secara optimal.

Penduduk usia kerja di pedesaan cenderung pergi ke kota (urbanisasi) untuk bekerja sebagai buruh pabrik, bangunan, pembantu rumah tangga, sektor

informal di kota dan meninggalkan sumber daya alam di desanya yang berlimpah di daerahnya. Dari gambaran banyaknya pengangguran usia pemuda (produktif) dan banyaknya potensi di desa yang melimpah tetapi kurang produktif, mendorong Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga mengembangkan program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)

Peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan salah satu titik berat pembangunan jangka panjang bidang sumber daya manusia untuk memiliki jiwa kepeloporan, kepemimpinan, dan kemandirian. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kewirausahaan pemuda, Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga meluncurkan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) untuk Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) sejak tahun 2003.

Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan kelompok-kelompok usaha pemuda dalam mengembangkan usaha-usaha kecil agar mampu mandiri. Program kewirausahaan pemuda untuk KUPP ini diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan managerial kewirausahaan serta meningkatkan kemampuan profesionalisme tenaga kerja muda agar lebih mampu mandiri, memanfaatkan peluang usaha, bahkan menciptakan lapangan kerja bagi kelompoknya.

Gerak nadi pembangunan masyarakat khususnya dalam sektor perekonomian dari waktu ke waktu senantiasa menuntut adanya bentuk-bentuk inovasi pada pola pengembangan perekonomian masyarakat. Dengan adanya

inovasi baru dalam pengembangan perekonomian masyarakat, diharapkan akan membawa perluasan peluang usaha dan tentunya akan berpotensi pada penciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Akan tetapi, realitas pengembangan sektor perekonomian di tengah-tengah masyarakat selalu terbentur pada masalah klasik yaitu pada masalah keterbatasan dana sebagai modal dalam menumbuh kembangkan sumber-sumber perekonomian alternatif.

Skill dan kemampuan manajemen usaha juga menjadi salah satu instrumen penentu berhasil atau tidaknya pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Harus diakui, bahwa skill dan pengetahuan serta kemampuan manajerial usaha masyarakat kita masih relatif rendah, sehingga dalam setiap pengembangan ekonomi alternatif, dituntut peran serta pemerintah sehingga terjadi peningkatan kemampuan masyarakat terutama dibidang manajemen usaha.

Dengan segala keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada, pemerintah tentunya juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa peran serta masyarakat secara proaktif. Namun harapan dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan regulasi dari pihak Pemerintah. Hal ini berarti bahwa proses peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat (peningkatan pendapatan ekonomi) harus berjalan secara sinergis dan timbal balik antara masyarakat sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai pihak pemegang regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi pada tingkatannya masing-masing. Sebagai

alternatif, peran swasta, kelompok-kelompok usaha dan koperasi tentunya sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diatas. Kelompok Usaha Bersama (KUBE), koperasi dan swasta yang didukung oleh Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan kemudahan dalam pengembangan usaha tentunya akan menentukan laju pertumbuhan dan perkembangan berbagai bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Dengan adanya semangat kebersamaan antara individu-individu yang terangkum dalam sebuah wadah, kelompok usaha, koperasi ataupun swasta diharapkan akan melahirkan sebuah konsep usaha yang mapan dan dapat diimplementasikan oleh masyarakat secara lebih cepat dan mudah.

Harus diakui bahwa telah banyak kegiatan yang dirancang oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang ditujukan untuk dapat mengangkat derajat dan taraf hidup masyarakat dan mengatasi permasalahan Rumah Tangga Miskin (RTM). Namun dalam implementasinya ternyata sistem pengembangan program tersebut sering mendapatkan kendala, baik yang disebabkan oleh karena kurang siapnya masyarakat dalam menerjemahkan program-program ini maupun karena adanya berbagai multitafsir dalam pelaksanaan program oleh para pengelola dan para pengambil keputusan dan kebijakan (*decision maker*).

Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pendidikan luar sekolah bagi masyarakat sangat penting dilaksanakan agar program-program pemerintah dapat berhasil dengan baik. Program pendidikan luar sekolah dapat

memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat sehingga akan mudah memahami program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dan turut terlibat di dalamnya.

Pendidikan luar sekolah (PLS) diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas daya pikir, daya kalbu dan daya fisik peserta didik sehingga yang bersangkutan memiliki lebih banyak pilihan dalam kehidupan, baik pilihan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pilihan kesempatan untuk bekerja maupun pilihan untuk mengembangkan dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, PLS memberikan bekal dasar kemampuan kesanggupan dan ketrampilan kepada peserta didik agar mereka siap menghadapi berbagai kehidupan nyata. Telah banyak upaya yang dilakukan dalam memberikan bekal dasar kecakapan hidup, baik melalui pendidikan di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat.

Upaya-upaya tersebut bukan tidak berhasil sama sekali dalam meningkatkan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan hidup tamatannya, akan tetapi kehidupan nyata yang memiliki ciri “berubah” telah menuntut PLS untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. PLS dituntut menghasilkan tamatannya yang mampu, sanggup, dan terampil untuk menghadapi tantangan hidup yang sarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus. Mampu dalam arti tamatan PLS memiliki kualifikasi yang dibutuhkan bagi kehidupan masa depan. Sanggup dalam arti tamatan PLS mmemiliki komitmen, bertanggung

jawab dan berdedikasi menjalankan kehidupannya. Terampil dalam arti cepat, cekat, dan tepat dalam mencapai sasaran hidup yang diinginkannya.

Mengingat peserta didik PLS berada dalam kehidupan nyata, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mendekatkan pendidikan (kegiatan belajar mengajar) dengan kehidupan nyata yang memiliki nilai-nilai preservative dan progresif sekaligus melalui pengintensifan dan pengefektifan pendidikan kecakapan hidup. Istilah pengintensifan dan pengefektifan perlu digarisbawahi agar tidak salah persepsi bahwa selama ini tidak diajarkan kecakapan hidup sama sekali dan yang diajarkan adalah kecakapan yang bersifat statis. Kecakapan hidup sudah diajarkan, akan tetapi perlu peningkatan intensitas dan efektivitasnya, sehingga PLS dapat menghasilkan tamatan yang mampu, sanggup, dan terampil terjun dalam kehidupan nyata nantinya. Undang-undang system pendidikan nasional telah mengamanatkan pendidikan kecakapan hidup, yang bunyinya:

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Jadi, pendidikan kecakapan hidup bukanlah sesuatu yang baru dan karenanya juga bukan topik yang orisinil. Yang benar-benar baru adalah bahwa kita mulai sadar dan berpikir bahwa relevansi antara pendidikan dengan kehidupan nyata perlu ditingkatkan intensitas dan efektivitasnya.

Pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi pada potensi kawasan lokal merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan luar sekolah. Pemuda-pemuda putus sekolah atau yang belum bekerja diberikan pendidikan kecakapan hidup dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal melalui pembentukan kelompok-kelompok pemuda produktif. Kelompok-kelompok pemuda tersebut diberikan pengetahuan, keterampilan dan bimbingan dalam berusaha sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi.

Meskipun bervariasi dalam menyatakan tujuan pendidikan kecakapan hidup bagi pemuda putus sekolah, namun konvergensinya cukup jelas yaitu bahwa tujuan utama pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa datang. Esensi dari pendidikan kecakapan hidup adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan nyata, baik preservatif maupun progresif.

Pendidikan kecakapan hidup memberikan manfaat pribadi peserta didik dan manfaat sosial bagi masyarakat. Bagi peserta didik, pendidikan kecakapan hidup dapat meningkatkan kualitas berpikir, kualitas kalbu, dan kualitas fisik. Peningkatan kualitas tersebut pada gilirannya akan dapat meningkatkan pilihan-pilihan dalam kehidupan individu, misalnya karir, penghasilan, pengaruh, prestise, kesehatan jasmani dan rohani, peluang, pengembangan diri, kemampuan kompetitif, dan kesejahteraan pribadi. Bagi masyarakat,

pendidikan kecakapan hidup dapat meningkatkan kehidupan yang maju dan madani dengan indikator-indikator adanya: peningkatan kesejahteraan sosial, pengurangan perilaku destruktif sehingga dapat mereduksi masalah-masalah sosial, dan pengembangan masyarakat yang secara harmonis maupun memadukan nilai-nilai religi, teori, solidaritas, ekonomi, kuasa dan seni (cita rasa).

Pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan melalui pendidikan luar sekolah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian suatu saat akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*),

serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh

karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1985: 67) menyatakan *“The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning”*.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: Pertama, upaya itu harus terarah (targetted) yang secara populer disebut pemihakan. Ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau dibandingkan penanganan yang dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat harus dapat dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental. Dalam pengertian pertama, dalam upaya ini diperlukan

perencanaan berjangka, serta pengeralahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, programnya harus bersifat nasional, dengan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

Pendekatan yang kedua, berupa perubahan yang diharapkan tidak harus terjadi secara cepat dan bersamaan. Kemajuan bisa terjadi secara bertahap dan tidak bersamaan. Perbedaan capaian hasil perubahan ini terjadi berdasarkan beberapa aspek yang mempengaruhinya seperti sektor program, wilayah dan kondisi yang berbeda. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program harus lebih didekatkan dengan masyarakat untuk mewujudkan tingkat objektivitas dan hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhannya. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat.

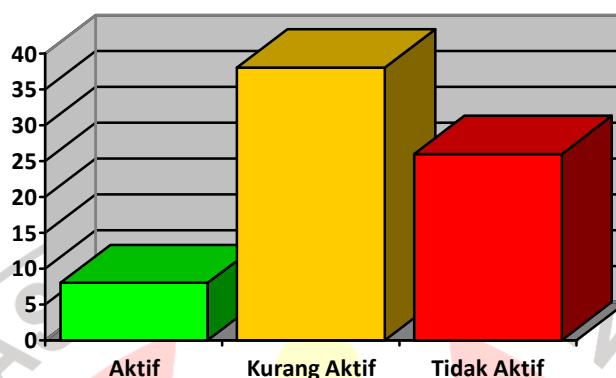
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diupayakan melalui kegiatan pembinaan kelompok-kelompok usaha produktif yang dikembangkan melalui pendidikan luar sekolah. Dalam pembinaan tersebut pemerintah dapat mengupayakan peran serta seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengembangan usaha dalam

kerangka peningkatan perekonomian masyarakat terutama anggota-anggota kelompok tersebut.

Kenyataan yang ditemui di lapangan bahwa pemberdayaan KUPP belum berpengaruh pada peningkatan perilaku kewirausahaan, khususnya pada aspek kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan produk-produk yang berbasis potensi kawasan. Anggota KUPP melakukan kegiatan secara konvensional tanpa melakukan inovasi-inovasi sehingga pendapatan yang mereka terima tidak meningkat malah mengalami kerugian dari tahun-ketahun. Rendahnya perilaku kewirausahaan anggota KUPP tersebut akan berpengaruh pada produktivitas usaha maupun kegiatan kelompok.

Hal ini ditunjukkan oleh data hasil observasi dan wawancara awal bahwa jumlah KUPP di provinsi Gorontalo pada tahun 2004-2010 sudah mencapai 72 KUPP. Dari jumlah tersebut terdapat 8 KUPP aktif dalam memberdayakan kelompoknya terutama dalam meningkatkan kemampuan pemuda putus sekolah dalam pendidikan kecakapan hidup. KUPP lainnya yang tidak aktif adalah KUPP yang hanya mengharapkan bantuan, atau dengan perkataan lain KUPP tersebut memiliki kegiatan bila mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pihak lainnya. KUPP yang aktif memberdayakan pemuda putus sekolah berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan kecakapan hidup pada bidang pertanian dan bidang-bidang lainnya. Namun produktivitas dan perilaku kewirausahaan sebagai akibat dari pemberdayaan tersebut kurang mengalami peningkatan yang cukup baik.

Keadaan KUPP di Provinsi Gorontalo berdasarkan kriteria aktif, kurang aktif, dan tidak aktif nampak pada grafik di bawah ini.



Gambar 1.1. Grafik Keadaan KUPP di Provinsi Gorontalo

Lemahnya perilaku kewirausahaan anggota KUPP disebabkan oleh faktor-faktor: (1) faktor sumber daya pemuda putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan, (2) usaha-usaha yang dilaksanakan pada KUPP masih bersifat turun temurun, seperti kegiatan pertanian masih dilakukan secara tradisional, (3) pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan selama ini masih merupakan program yang menjadi kebijakan sebagai penanggulangan sementara terhadap pengangguran yang diakibatkan oleh proses pendidikan formal. PKH hanya menjadi program yang tidak substansif sebagai suatu upaya administratif proyek, (4) PKH belum dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, dalam hal ini penyusunan model PKH belum melibatkan anggota KUPP dalam pemanfaatan potensi lokal, penyusunan rancangan jadwal, dan penentuan biaya dan anggaran, (5) pelaksanaan PKH tidak berpusat pada satu aspek, tetapi meliputi seluruh aspek usaha dan pengembangannya

Berdasarkan analisis di atas, maka peneliti berusaha mengungkapnya melalui suatu penelitian dengan mengangkat judul “Model Pemberdayaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif melalui Pendidikan Kecakapan Hidup Berbasis Kawasan dalam Meningkatkan Perilaku Wirausaha di Provinsi Gorontalo”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok masyarakat terutama untuk kelompok pemuda yang diharapkan berimplikasi pada peningkatan ekonominya harus di programkan secara baik. Program pemberdayaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif melalui pendidikan kecakapan hidup di Provinsi Gorontalo menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan sumberdaya pemuda yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka menjadi kelompok penganggur yang tidak memiliki keterampilan.

Pemberdayaan pemuda yang bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitasnya melalui pelatihan keterampilan harus memperhatikan potensi dan peluang kawasan dimana kelompok tersebut berada. Kelompok usaha pemuda produktif yang sudah menjadi salah satu program unggulan oleh Departemen Pendidikan RI maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pemuda putus sekolah atau yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya agar memiliki keterampilan untuk kemandirian secara ekonomi.

Di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir, program ini sudah dilaksanakan namun belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Dalam implementasinya pelatihan keterampilan yang diberikan tidak berorientasi pada kecakapan hidup sesuai kebutuhan dan prospek ekonomi yang sedang berkembang. Di samping itu program ini dalam pelaksanaannya tidak berbasis pada potensi kawasan sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan ketersediaan sumber daya lokal serta kebutuhan masyarakat (*missed basic needs*).

Kondisi ini dapat berakibat pada kesinambungan program Kelompok Usaha Pemuda Produktif, dimana bisa menimbulkan kurang ketertarikan pemuda terhadap program ini. Dengan mengedepankan keterkaitan potensi kawasan dan tingkat kebutuhan keterampilan dan hasil produktifitasnya maka diharapkan program Kelompok Usaha Pemuda Produktif di Provinsi Gorontalo akan bernilai ekonomi bagi anggota kelompok tersebut. Hal ini jelas menjadi suatu program pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup (*life skill*). Ini juga sesuai dengan pemahaman terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai usaha pengalokasian kekuasaan melalui perubahan struktur sosial atau sebagai suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh upaya pemberdayaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif melalui pendidikan kecakapan hidup di Provinsi Gorontalo di antaranya adalah (1) pembentukan KUPP dilaksanakan tidak

berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan, (2) tidak terdapat persyaratan yang mengikat secara program terhadap persetujuan pendirian KUPP, (3) pengelola dan pengurus KUPP kurang memahami tujuan dan mekanismen pengelolaan KUPP, (4) rekrutmen anggota KUPP hanya berdasarkan faktor status pendidikan dan kategori usia, (5) penetapan pendidikan hidup belum mengacu pada kebutuhan warga belajar, (6) pendidikan kecakapan hidup dipilih oleh KUPP belum berorientasi pada potensi kawasan, (7) penetapan fasilitator pendidikan kecakapan hidup pada KUPP tidak berdasarkan kompetensi, (8) belum optimalnya pengelolaan KUPP dikaitkan dengan pemberdayaan pemuda putus sekolah, (9) pendidikan kecakapan hidup pada KUPP belum memprioritaskan peningkatan perilaku kewirausahaan pada warga belajarnya, (10) belum maksimalnya daya dukung masyarakat terhadap program KUPP, (11) belum optimalnya peran pemerintah dalam membina KUPP.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup bahasan tentang Pemberdayaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif melalui pendidikan berbasis kawasan maka dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah bagaimana pendidikan kecakapan hidup pada kelompok usaha pemuda produktif menjadi sebuah upaya pemberdayaan. Keterkaitan antar ketiga variabel di atas dibatasi pada efektifitas program dan potensi kawasan

sehingga bisa mengatasi persoalan berupa pengangguran dan kemampuan ekonomi di kalangan pemuda di Provinsi Gorontalo melalui peningkatan perilaku wirausaha anggotanya.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian: Model Pemberdayaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Melalui Pendidikan Kecakapan Hidup Berbasis Kawasan dalam meningkatkan perilaku kewirausahaan maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya sebagai pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi objektif pemberdayaan kelompok usaha pemuda produktif di Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana model konseptual pemberdayaan program pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan oleh KUPP di Provinsi Gorontalo?
3. Bagaimana implementasi model pemberdayaan kelompok usaha pemuda produktif melalui pendidikan kecakapan hidup berbasis kawasan dalam mengukur perilaku kewirausahaan di Provinsi Gorontalo?
4. Bagaimana efektivitas model pemberdayaan kelompok usaha pemuda produktif melalui pendidikan kecakapan hidup berbasis kawasan dalam meningkatkan perilaku kewirausahaan di Provinsi Gorontalo?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan pendidikan kecakapan hidup berbasis kawasan sebagai pemberdayaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif di

Provinsi Gorontalo secara efektif dan berimplikasi pada kemandirian kelompok.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memahami hasil analisis yang berkenaan dengan:

1. Kondisi objektif pemberdayaan kelompok usaha pemuda produktif di Provinsi Gorontalo.
2. Model konseptual pemberdayaan kelompok usaha pemuda produktif melalui pendidikan kecakapan hidup berbasis kawasan dalam meningkatkan perilaku kewirausahaan di Provinsi Gorontalo.
3. Implementasi model pemberdayaan kelompok usaha pemuda produktif melalui pendidikan kecakapan hidup berbasis kawasan dalam mengukur perilaku kewirausahaan di Provinsi Gorontalo.
4. Efektivitas model pemberdayaan kelompok usaha pemuda produktif melalui pendidikan kecakapan hidup berbasis kawasan dalam meningkatkan perilaku kewirausahaan di Provinsi Gorontalo.

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pemberdayaan pemuda melalui pendidikan kecakapan hidup berbasis kawasan dalam meningkatkan perilaku kewirausahaan di Provinsi Gorontalo.

Dari segi praktisnya, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan model pemberdayaan Pendidikan Kecakapan Hidup yang berbasis kawasan dalam pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
2. Mengoptimalkan Pendidikan Kecakapan Hidup sebagai program pemerintah di bidang pendidikan luar sekolah pada KUPP
3. Membantu pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memberdayakan pemuda melalui program Pendidikan Kecakapan Hidup berbasis kawasan agar memiliki keterampilan
4. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang pola dan strategi pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup berbasis kawasan dalam program pendidikan luar sekolah

F. Kerangka Konseptual

Untuk mengarahkan penelitian ini, maka perlu adanya kerangka konseptual tentang aspek-aspek yang akan diteliti.

1. Pemberdayaan adalah upaya yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan tranpormasi budaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya.

2. Kelompok Usaha Pemuda Produktif adalah kelompok pemuda Departemen Pendidikan Nasional dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan berwirausaha bagi pemuda dalam mengembangkan usaha mandiri yang berbasis pada keunggulan lokal.
3. Pendidikan Kecakapan Hidup adalah proses pemahaman kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Tim BBE Depdiknas, 2002: 9). Pendidikan kecakapan hidup dibagi menjadi dua kategori, yaitu kecakapan hidup yang bersifat dasar dan instrumental. Kecakapan hidup yang bersifat dasar adalah kecakapan yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman, tidak tergantung pada perubahan waktu dan ruang, dan merupakan fondasi dan sokoguru bagi tamatan PS dan PLS agar bisa mengembangkan kecakapan hidup yang bersifat instrumental. Kecakapan hidup yang bersifat instrumental adalah kecakapan yang bersifat relatif kondisional, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu, situasi, dan harus diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan derap perubahan. Mengingat perubahan kehidupan berlangsung secara terus menerus, maka diperlukan kecakapan-kecakapan yang mutakhir, adaptif dan antisipatif. Oleh karena itu, prinsip belajar sekali selesai dan tidak perlu belajar lagi. tidak relevan lagi.

Tamatan PS dan PLS, selain harus belajar sesuatu yang baru (learning), harus juga mampu melupakan pengalaman belajar yang lalu yang tidak lagi relevan lagi dengan kehidupan saat ini (unlearning) dan selalu belajar kembali (relearning)

4. Berbasis kawasan adalah suatu realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, ciri khas kawasan dan memiliki keunggulan komparatif.
5. Perilaku kewirausahaan adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya dalam usaha meningkatkan derajat kehidupannya melalui proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi.